KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RAPBN 2018 Disepakati untuk Disahkan
Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 9

RAPBN 2018 Disepakati untuk Disahkan

SP/JOANITO DE SAOJOAO

Pimpinan Sidang Taufik Kurniawan di dampingi Agus Hermanto berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI Ke 10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

[JAKARTA] Pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN 2018 dengan mematok postur belanja negara sebesar Rp 2.220,7 triliun dan pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun, dengan perkiraan defisit 2,19% (setara Rp 325,9 triliun) terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 275,4 triliun. Khusus untuk penerimaan pajak disepakati sebesar 1.423,9 triliun.

Sedangkan belanja negara akan dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian-lembaga (K/L) disepakati Rp 847,44 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 607,06 triliun.

Kesepakatan mengenai APBN 2018 ini disahkan melalui rapat paripurna DPR di Gedung DPR Jakarta, Rabu (25/10). Dari 10 fraksi yang hadir menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna tersebut, hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak pengajuan RUU APBN 2018 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun Fraksi Partai Sejahtera (PKS) menerima dengan catatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu menyatakan, fokus penetapan APBN 2018 adalah sesuai dengan spirit pemerintahan Jokowi-JK yang ingin memeratakan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat semaksimal mungkin.

Menkeu menegaskan, pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan fiskal yang mendukung kegiatan ekonomi namun secara terukur, sehingga tingkat defisit APBN primer maupun total tetap terjaga secara aman dan *prudent*.

Pada 2018, lanjut dia, pemerintah akan menempuh tiga strategi fiskal. Pertama, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Kedua, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Ketiga, mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Menurut Menkeu, APBN 2018 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi makro.

Adapun indikator makro 2018 meliputi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar rupiah Rp 13.400 per dolar AS, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,2%, Indonesia Crude Price (ICP) rata-rata US$ 48,0 per barel, serta *lifting* minyak dan gas bumi masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Menkeu menjelaskan, besaran indikator ekonomi makro tersebut dipengaruhi berbagai faktor global dan domestik. Faktor global meliputi harga komoditas yang masih lemah, perdagangan dunia meningkat namun masih dibayangi isu proteksionisme, perlambatan permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Asia.

Sedangkan faktor domestik yang menjadi pertimbangan adalah tingkat kepercayaan dan daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, peningkatan peran swasta melalui kredit investasi dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran, serta penguatan cadangan devisa.

Penguatan Reformasi

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai target pendapatan negara 2018, pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta kepabeanan dan cukai, antara lain melalui dukungan Automatic Exchange of Information (AeoI) agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak. Kemudian, penguatan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih *up to date* dan terintegrasi, melalui e-filing, e-reform, dan e-faktur. Juga membangun kepatuhan dan kesadaran pajak, serta perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan maupun bandara, serta penegakan pemberantasan penyelundupan. [ID/M-6]